



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP BECAK  
BERMOTOR YANG MELINTAS DI KAWASAN TERTIB  
LALU LINTAS BERDASARKAN PERATURAN  
WALIKOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN  
2017 TENTANG KAWASAN TERTIB  
LALU LINTAS KOTA DUMAI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**OLEH :**

**M.SOBRI DARWIS ADE SAPUTRA**  
**NIM. 11720714936**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
1443 H/2021 M**



## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP BECAK BERMOTOR YANG MELINTAS DI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KOTA DUMAI”**, yang ditulis oleh:

Nama : M.SOBRI DARWIS ADE SAPUTRA

NIM : 11720714936

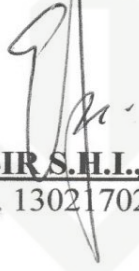
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru; 1 September 2021

Pembimbing Skripsi

  
**BASIR S.H.I., M.H.**  
NIK. 130217026

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP BECAK BERMOTOR YANG MELINTAS DI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KOTA DUMAI"* yang ditulis oleh :

Nama : **M. Sobri Darwis Ade Saputra**  
 NIM : 11720714936  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 20 September 2021  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Oktober 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Asril, S.H.I., M.H.**

Sekretaris  
**Musrifah, S.H, M.H.**

Penguji I  
**Dr. ABU SAMAH, M.H**

Penguji II  
**Firdaus, SH., MH**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 19741006 200501 1 005





Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. SOBRI DARWIS ADE SAPUTRA

NIM : 11720714936

Tempat/Tgl. Lahir : DUMAI, 10 JUNI 1999

Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH & HUKUM

Prodi : ILMU HUKUM

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP BECAK BERMOTOR  
YANG MELINTAS DI KAWASAN TERTIB LAU LINTAS BERDASARKAN  
PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG  
KAWASAN TERTIB LAU LINTAS KOTA DUMAI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 SEPTEMBER 2021

Yang membuat pernyataan



M. SOBRI DARWIS ADE SAPUTRA

NIM : 11720714936

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**M.Sobri Darwis Ade Saputra, (2021): Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Becak Bermotor Yang Melintas Di Kawasan Tertib Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap becak bermotor yang melintas di kawasan tertib lalu lintas, banyak nya becak bermotor yang masih melintas di Kawasan tertib lalu lintas di Kota Dumai, membuat Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sangat dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas yang terdapat dalam Pasal 8 ayat 1 berbunyi “Dilarang becak dayung, becak bermotor melalui/melintasi di ruas jalan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas”.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan terhadap becak bermotor yang melintas di kawasan tertib lalu lintas berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai dan apa saja faktor penghambat pengawasan Dinas Perhubungan terhadap becak bermotor yang melintas di kawasan tertib lalu lintas berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai.

Penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis, yaitu melakukan penelitian di lapangan yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai, Kepala Bidang Angkutan dan Sarana, Kepala Bidang Lalu Lintas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Pemilik Becak Bermotor, maka penulis mengambil sampel dengan teknik *Purposive Sampling*. Penelitian ini merupakan penelitian yang dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Dumai terhadap becak bermotor yang melintas di kawasan tertib lalu lintas berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat di lihat masih banyaknya becak bermotor yang melintas di ruas jalan pada kawasan tertib lalu lintas Kota Dumai.

Adapun faktor-faktor yang menghambat pengawasan Dinas Perhubungan terhadap becak bermotor yang melintas di kawasan tertib lalu lintas adalah, faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor dana dan anggaran serta faktor pemberian sanksi terhadap pelanggar Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai Yang Belum Tegas.

**Kata kunci : Pengawasan, Dinas Perhubungan, Becak Bermotor.**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhammdulillahi Rabbil Alamin, puji syukur yang tiada hentinya penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul : ***“Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Becak Bermotor Yang Melintas Di Kawasan Tertib Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai”***.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun secara materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Daruwis, dan Ibunda Elni Marusda, serta Adek Siti Shakira, Muhammad Rangga Saputra dan Erda Nabilla yang telah memberikan motivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih Bapak dan Ibu atas do’a restu dan ridho nya.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta jajaran yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengembangkan pendidikan di Universitas ini.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengembangkan pendidikan di Fakultas ini.
4. Bapak Asril SH.I, MH Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Dr. Alpi Syahrin, MH Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Basir SH.I, MH sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Azwar SE, M.EC selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberikan nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terkhususnya Prodi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Asnar, SP. M,Si, Selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai yang telah memberikan izin penelitian pada instansi yang dipimpin.
9. Bapak Mahadi Ferdinand, S. Sos, M. Si, Selaku Kepala Bidang Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Kota Dumai yang telah memberikan informasi dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Jenny Safriady, ST, Selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Dumai yang telah memberikan informasi dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Ibu Normalina, A.Md, Selaku Kasubag TU.UPT PKB Dinas Perhubungan Kota Dumai yang telah memberikan informasi dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada kawan-kawan kelas IH E dan HTN E, serta kawan-kawan seangkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.
13. Kepada kawan-kawan Tim KKN-DR Dumai Kota yang telah memberikan inspirasi dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada Danty Rahellinas yang telah memberikan semangat, masukan, saran, serta memberikan inspirasi dan motivasi demi kelancaran pembuatan skripsi ini.
15. Kepada Azmul Hafiz, Hidayatul Ihsan , Iin Saifullah, M. Rizky Maulana, Rapida Lisman, teman satu diskusi yang memberikan ilmu-ilmu baru.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dengan kebaikan yang jauh lebih baik dan mendapatkan ridho-Nya. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan bisa menambahkan khasanah ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin.

***Wassalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh***

Pekanbaru; Oktober 2021

**M.SOBRI DARWIS ADE SAPUTRA**  
**NIM.11720714936**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II GAMBARAN UMUM</b>	
A. Gambaran Kota Dumai .....	13
B. Visi Dan Misi Kota Dumai.....	15
C. Keadaan Geografis Kota Dumai.....	16
D. Jumlah Penduduk Kota Dumai .....	18
E. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Dumai .....	19
F. Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Kota Dumai .....	22
G. Tujuan Dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Dumai.....	23
H. Denah Lokasi Dinas Perhubungan Kota Dumai.....	24
I. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Dumai.....	25
J. Logo Dinas Perhubungan Kota Dumai.....	26
K. Strategi Dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Dumai .....	27
L. Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kota Dumai .....	27
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Teori Pengawasan.....	33
B. Teori Penegakan Hukum .....	38
C. Teori Transportasi .....	41
D. Teori Angkutan Umum .....	52

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

- A. Bagaimana Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Becak Bermotor Yang Melintas Di Kawasan Tertib Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai..... 58
- B. Apa Saja Faktor Penghambat Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Becak Bermotor Yang Melintas Di Kawasan Tertib Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai..... 64

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 71
- B. Saran ..... 72

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel I. 1</b>	: Populasi dan Sampel.....	9
<b>Tabel II. 1</b>	: Luas Wilayah Kota Dumai .....	18
<b>Tabel II. 2</b>	: Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin.....	18
<b>Tabel II. 3</b>	: Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Dumai .....	25
<b>Tabel II. 4</b>	: Jumlah Pegawai .....	31
<b>Tabel II. 5</b>	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Pendidikan .....	32



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar III. 1</b>	: Denah Lokasi Dinas Perhubungan Kota Dumai .....	24
<b>Gambar III. 2</b>	: Logo Dinas Perhubungan Kota Dumai .....	26
<b>Gambar III. 3</b>	: Proses Pengawasan.....	37





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan salah satu sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan ekonomi, social, politik dan mobilitas penduduk suatu daerah. Dengan tingginya mobilitas masyarakat di suatu daerah dalam menjalankan perputaran roda pembangunan nasional yang khususnya di bidang perekonomian, maka diperlukan pelayanan jasa di bidang transportasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada umumnya, permasalahan transportasi terletak pada ketidak seimbangan antara kebutuhan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi, serta pertumbuhan penduduk dan juga perkembangan ekonomi suatu daerah atau wilayah. Dengan begitu perkembangan suatu wilayah dapat diartikan bahwa perkembangan suatu daerah maupun masyarakatnya atau wilayah tergantung dari perkembangan transportasi, atau sebaliknya. Adapun fungsi transportasi sendiri adalah sebagai sektor pemberi jasa. Berkaitan dengan sangat pentingnya fungsi transportasi maka ada yang menganggap bahwa transportasi merupakan urat nadi perekonomian, namun menurut Schumer transportasi bukan merupakan tujuan tetapi merupakan sarana untuk mencapai banyak tujuan.<sup>1</sup>

Jenis transportasi umum dalam kota semakin meningkat, membuat Kota Dumai semakin semrawut. Contohnya angkutan umum, ojek, becak, dan yang saat ini ramai diperbincangkan adalah becak bermotor (bentor). Becak bermotor

---

<sup>1</sup> C.S.T, Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, (Rineka Cipta : Jakarta, 1995), h. 35.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan transportasi umum yang berbeda dari sepeda motor atau kendaraan bermotor roda dua pada umumnya. Becak bermotor memiliki tiga roda yang mana berbeda dengan sepeda motor yang hanya memiliki dua roda dan penumpang berada di bagian depan pengendara layaknya angkutan becak.<sup>2</sup> Bentuknya yang seperti itu membuat becak bermotor dapat mengangkut penumpang lebih banyak dari pada sepeda motor biasa dan dapat melaju lebih cepat dari becak.

Munculnya fenomena becak bermotor di Kota Dumai dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat yang meningkat di bidang jasa transportasi. Di Kota Dumai sendiri becak bermotor sudah tidak terkendali dan terkesan sangat semrawut. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak diatur secara jelas mengenai kendaraan becak bermotor.<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) kendaraan terbagi atas terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Untuk kendaraan bermotor sendiri dikelompokkan berdasarkan jenis seperti : sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Selain itu secara teknis becak bermotor di Kota Dumai belum dilakukan uji kelayakan beroperasi tetapi keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sudah sangat menjamur. Padahal dalam Pasal 48 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mengatur

<sup>2</sup> Abdi Wibowo, Dkk, *Pengembangan Desain Konstruksi Kendaraan Becak Bermotor*, Jurnal Teknik Mesin Sinergi, Vol. 6 No. 2, 2008, H. 78..

<sup>3</sup> Meta Suryani dan Anis Mashdurohatun, *Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Pembaharuan hukum, Vol. 3 No.1, Januari 2016, h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor. Selain itu diatur pula dalam Pasal 49 Tentang pengujian kendaraan bermotor.<sup>4</sup>

Di Kota Dumai becak bermotor hanya memiliki payung hukum berupa Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai.<sup>5</sup> Dalam Peraturan Walikota tersebut mengatur larangan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) : *“Dilarang becak dayung, becak bermotor melalui/melintasi di ruas jalan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas”*.

Dengan hadirnya Peraturan Walikota tersebut mestinya sudah ada larangan yang jelas terhadap becak bermotor melintas di kawasan tertib lalu lintas Kota Dumai, tapi fakta yang terjadi aktifitas becak bermotor telah melanggar batasan yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017. Hal ini menjadi masalah baru yang di hadapi oleh Kota Dumai terkhususnya dibidang transportasi, Dinas Perhubungan Kota Dumai selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah transportasi sepertinya belum sepenuhnya efektif dalam menangani masalah becak motor.

Peningkatan kinerja Dinas Perhubungan memberikan fokus khusus pada sumber daya manusia (pegawai) termasuk aspek – aspek yang berkenan dengannya. Potensi sumber daya manusia pada hakikatnya adalah merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional, namun selama ini masih dirasakan bahwa potensi sumber daya manusia tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal mengingat sebagian besar angkatan kerja tingkat keterampilan dan

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>5</sup> Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai Pasal 8 huruf a.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikannya masih rendah. Hal ini berakibat pula terhadap rendahnya pendapatan dan kesejahteraanya. Keadaan tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap sikap mental para tenaga kerja di lingkungan kerja yang berakibat rendahnya hasil kerja. Mengingat karena masyarakat Indonesia mempunyai budaya yang majemuk dan adanya pengaruh budaya asing maka hal tersebut dapat menghambat terwujudnya sikap mental dan sikap sosial pegawai. Untuk itu maka perlu disusun motivasi di lingkungan Dinas Perhubungan sehingga dapat meningkatkan kinerja. Dinas Perhubungan Kota Dumai merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peran penting sebagai pelayanan publik khususnya di bidang Transportasi di Kota Dumai. Masalah perhubungan di Kota Dumai yang akan menjadi tolak ukur bagi daerah lain. Mampu dan tidaknya Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam mengaplikasikan tugas-tugasnya sangat di tentukan sejauh mana organisasi tersebut di dukung oleh Sumber Daya Manusia yang secara interaktif dalam melaksanakan program – program kerjanya.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka perlu dikaji lebih mendalam lagi mengenai permasalahan larangan melintas becak bermotor melintas di Kawasan Tetib Lalu Lintas di Kota Dumai. Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang ada, penulis mengadakan penelitian dengan judul **“Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Becak Bermotor Yang Melintas Di Kawasan Tertib Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai”**.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini di fokuskan kepada Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Becak Bermotor Yang Melintas Di Kawasan Tertib Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai.

## **C. Rumusan Masalah**

Bertolak dari permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu :

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Becak Bermotor Yang Melintas Di Kawasan Tertib Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai ?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Becak Bermotor Yang Melintas Di Kawasan Tertib Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Becak Bermotor Yang Melintas Di Kawasan Tertib Lalu Lintas Berdasarkan



Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Becak Bermotor Yang Melintas Di Kawasan Tertib Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai.

### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah sehingga peneliti dapat menyimpulkan manfaat penelitian ini dilakukan adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Sebagai bahan referensi dan bahan pembanding dalam pembahasan dan pengkajian ilmu pengetahuan terhadap Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Becak Bermotor. Serta untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang telah di dapatkan selama masa perkuliahan dan juga berguna bagi perkembangan khazanah Ilmu Hukum.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti, lembaga pemerintah terkait, dan tentunya aparaturnya pelaksana Peraturan Walikota Dumai tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas untuk dapat lebih meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan pemerintah khususnya terkait

pelaksanaan Peraturan Walikota Dumai tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas agar dapat berjalan secara efektif dan maksimal.

## F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam membuat penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penulisan yuridis sosiologis yaitu dengan cara membahas permasalahan yang ada dengan melihat peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian dapat di gunakan untuk menjelaskan, menguraikan dan memprediksi suatu fenomena, sehingga bisa menghasilkan pengetahuan baru.<sup>6</sup> Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau lapangan, dengan melakukan survey secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana hukum ini berlaku di masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan). Namun tidak mengkaji sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (*law in action*).<sup>8</sup> Sifat Penelitian Penelitian ini

<sup>6</sup> Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : And, 2017), h. 5.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta : UII Press, 1982), h. 51.

<sup>8</sup> Hajar. M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru : Suska Press, 2015), h. 112.

bersifat deksriptif, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.<sup>9</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Dumai. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena berdasarkan pasal 9 ayat (5) huruf a Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas, Dinas perhubungan mempunyai tugas menertibkan angkutan kota yang tidak memiliki trayek pada ruas jalan di dalam Kawasan Tertib Lalu Lintas.

Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap becak bermotor yang melintas di kawasan tertib lalu lintas berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian adalah yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.<sup>10</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Dumai.

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 25.

<sup>10</sup> Djam'in Satrio dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Objek Penelitian adalah masalah atau tema yang akan diteliti.<sup>11</sup> Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Becak Bermotor Yang Melintas Di Kawasan Tertib Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dan himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>12</sup> Dapat diartikan juga sebagai keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.<sup>13</sup> Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Menurut Arikunto, penentuan pengambilan sampel apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua, jika jumlah subjeknya besar maka dapat diambil antara 10% - 50%.

<sup>11</sup> Hartono, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru : Anafah Publishing, 2011), h. 46.

<sup>12</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 118.

<sup>13</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), h. 65.

Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada table di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sample	Presentase
1	Kepala Dinas Perhubungan	1 orang	1 orang	100%
2	Kepala Bidang Angkutan Umum dan Sarana	1 orang	1 orang	100%
3	Kepala Bidang Lalu Lintas	1 orang	1 orang	100%
4	Pemilik Becak Bermotor	180 orang	8 orang	20%
Jumlah		183 orang	11 orang	

*Sumber: Data Olahan, 2020*

## 5. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier :

- Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian.<sup>14</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak dan informasi yang dibutuhkan dan relavan dengan kebutuhan penelitian.
- Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>
- Data Tersier, yaitu bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 30.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 106.

dan sekunder.<sup>16</sup> Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ketetapan Hukum, ensiklopedia, majalah, indeks kumulatif, surat kabar dan sebagainya.<sup>17</sup>

## 6. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang di perlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati,<sup>18</sup> dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk melengkapi data yang diperlukan.<sup>19</sup>

## 7. Analisis Data

Setelah data tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisa secara sistematis dalam penelitian ini menjalankan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis kualitatif dalam penelitian ini menjabarkan secara bermutu dalam

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014), h. 13.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *loc. cit.*

<sup>18</sup> Heris Herdiansyah, *Metode Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), h. 106.

<sup>19</sup> Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 127.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian atau dengan kata lain yakni proses penyusunan, mengategorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami makna nya.<sup>20</sup> Dari hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu data yang diperoleh dari wawancara diolah dengan cara mengelompokkan dan memilih menurut jenisnya. Data atau bahan yang bersifat kualitatif dalam bentuk uraian kalimat yang jelas dan rinci sesuai dengan masalah pokok. Selanjutnya data dibahas dengan cara membandingkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini, lalu di tarik suatu kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus yang lazim disebut metode deduktif.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 78.

<sup>21</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : RinekaCipta, 2008), h.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### A. Gambaran Kota Dumai

Dumai merupakan sebuah dusun kecil dipesisir timur Provinsi Riau. Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Diresmikan sebagai Kota pada tanggal 20 April 1999 dengan Undang-undang No. 16 Tahun 1999 dimana status Dumai sebelumnya adalah Kota Administratif. Pada awal pembentukan wilayah administrasi pemerintahan, Kota Dumai memiliki 3 wilayah kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk hanya 15.699 jiwa tingkat. Dumai mengalami beberapa kali peningkatan status. Semasa bergabung dengan Kabupaten Bengkalis, semula Dumai berstatus sebagai Kota Administratif, yang kemudian ditingkatkan menjadi Kota Madya.<sup>22</sup>

Setelah diberlakukannya Otonomi Daerah, Dumai dimekarkan menjadi sebuah kota yang berdiri sendiri, berpisah dari Kabupaten Bengkalis, pada 27 April 1999 berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1999.

Kota Dumai memiliki luas wilayah 1.727.385 Km<sup>2</sup> dan merupakan kota terluas nomor dua di Indonesia setelah Manokwari. Saat ini Dumai dicanangkan sebagai kota yang masuk dalam zona Pasar Bebas Internasional.

Pada era tahun 1930-an, Dumai merupakan suatu dusun nelayan kecil yang terdiri atas beberapa rumah nelayan. Penduduknya bertambah ketika Jepang mendatangkan kaum *romusha* (pekerja paksa jaman penjajahan Jepang) dari Jaw. Seiring perubahan waktu, terjadi perubahan status Dumai sebagai berikut :

<sup>22</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Dumai/](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Dumai/). Diakses pada tanggal 10 Juni 2021, jam 16:30 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tahun 1945-1959, status Dumai tercatat sebagai desa.
- b. Tahun 1959-1963, Dumai masuk dalam wilayah Kecamatan Rupert.
- c. Tahun 1963-1964, Dumai berpisah dari Kecamatan Rupert dan berubah status menjadi kawedanan.
- d. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 1979 tertanggal 11 April 1979, Dumai berubah status menjadi Kota Administratif (merupakan kota administratif pertama di Sumatera dan ke-11 di Indonesia) di bawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis.
- e. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3829), Dumai berubah status menjadi Kota madya sehingga menjadi Kota madya Dati. II Dumai. Seiring perkembangan politik di Indonesia, berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 maka Kota madya Dumai berubah menjadi Kota Dumai. Masa jabatan Walikota Dumai pertama dari tanggal 27 April 1999 sehingga tanggal 27 April dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai.

Terdapat beberapa filosofis yang cukup mendasar atas peningkatan status Kota Dumai dalam tatanan pengelolaan wilayah administrasi pemerintahan, diantaranya adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat tingkat pelayanan serta memperbesar peran dari masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat, disamping itu juga untuk menangkap berbagai peluang dan pengembangan ekonomi.

Di dalam sejarah Kota Dumai pernah menjadi kota paling luas nomor dua di Indonesia setelah Kota Manokwari, di Papua. Akan tetapi, semenjak Kota



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Manokwari tersebut pecah dan kemudian terbentuk kabupaten Wasior, maka Kota Dumai pun menjadi kota terluas di Indonesia. Dalam catatan sejarah, Dumai merupakan sebuah dusun kecil di daerah pesisir timur Provinsi Riau. Dan kini kota ini terus menggeliat, menjadi mutiara di pantai timur Pulau Sumatera. Kota Dumai juga merupakan hasil pemekaran dari Daerah Kabupaten Bengkalis.

Kota Dumai dijuluki dengan Kota Pengantin Berseri, PENGANTIN BERSERI adalah singkatan dari Kota PENGANTIN (Pelabuhan, Perdagangan, Tourism dan Industri) BERSERI (Bersih, Semarak, Rukun, dan Indah) SEHAT (Sejahtera, Harmonis, Aman dan Tertib).

#### B. Visi dan Misi Kota Dumai

Visi Kota Dumai adalah dalam membangun Kota Dumai, pemerintah kota telah menetapkan Visi Pembangunannya, yaitu :

*“Terwujudnya Kota Dumai Sebagai Pusat Pelayanan “Pengantin” (Pelabuhan, Perdagangan, Tourism dan Industri) yang “Berseri” (Bersih, Semarak, Rukun dan Indah) di Kawasan Pantai Timur Sumatera Sebagai Penggerak Kemajuan Ekonomi dan Budaya Melayu yang Agamis Menuju Dumai Kota “Sehat” (Sejahtera, Harmonis, Aman dan Tertib)”.*

Misi Kota Dumai, yaitu :

1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta memperkuat struktur perekonomian yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan untuk peningkatan daya beli masyarakat melalui perkembangan sektor unggulan yaitu sektor PENGANTIN (Pelabuhan, Perdagangan, Tourism, dan Industri).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia yang tangguh dan professional yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemampuan dalam penguasaan teknologi dan keahlian spesifikasi yang dapat diandalkan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur baik yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna mendorong perkembangan Kota Dumai menjadi kota yang BERSERI (Bersih, Semarak, Rukun dan Indah).
4. Mengembangkan kemampuan aparatur pemerintah yang bersih dari KKN serta berwibawa dan mampu memberikan pelayanan yang efisien dan efektif yang dapat memuaskan masyarakat pada umumnya serta investor pada khususnya.
5. Mengembangkan budaya melayu sebagai jati diri Kota Dumai dan budaya tempatan guna memotivasi peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan menyaring masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kaidah dan nilai budaya melayu dan budaya tempat.<sup>23</sup>

### C. Keadaan Geografis Kota Dumai

Secara geografis, Kota Dumai terletak di 1023 – 1024'23" Bujur Timur dan 101023'37" – 101028'13" Lintang Utara dengan batas wilayah sebelah Utara, Dumai berbatasan dengan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Sebelah Timur, Dumai berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, dan Sebelah Barat, Dumai berbatasan

<sup>23</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Dumai/](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Dumai/). Diakses pada tanggal 10 Juni 2021, jam 16:30 Wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Wilayah Kota Dumai beriklim tropis dengan curah hujan antara 100-300 cm dan suhu udara 24-33C dengan kondisi tanah rawa bergambut.

Iklim di Dumai adalah iklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu udaranya rata-rata antara 21 – 35 °C dan rata-rata curah hujan antara 100 – 300 mm. Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan di sebelah selatan sebagian adalah dataran tinggi. Kondisi tanahnya mayoritas berupa tanah rawa yang bergambut dengan kedalaman antara 0 – 0,5 m. Struktur tanah umumnya terdiri dari tanah *padsolik* merah kuning dari batuan endapan, *alluvial* dan tanah *organosol* dan *gley* humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah.

Terdapat 15 sungai di wilayah Dumai, Sungai-sungai tersebut dapat dilayari kapal pompon, sampan dan perahu sampai jauh ke hulu sungai. Sungai-sungai tersebut adalah sungai : Buluala (40Km), Geniut (12Km), Kepala Beruang (5Km), Kemeh (10Km), Mampu (13Km), Merambung (7Km), Mesjid (29Km), Nerbit (12Km), Pelintung (8,5Km), Santaulu (22Km), Selinsing (4Km), Senepis (35Km), Tanjung Leban (3Km), Teluk Dalam (10Km), Teras (10Km). Kota Dumai merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau ditinjau dari letak geografis, berikut ini luas perkecamatan :

**Tabel II.1**

**Luas Wilayah Kota Dumai**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah kota Dumai Menurut Kecamatan (Km2)		
		2018	2019	2020
1.	Bukit Kapur	200,00	200,00	200,00
2.	Medang Kampai	373,00	373,00	373,00
3.	Sungai Sembilan	975,38	975,38	975,38
4.	Dumai Barat	44,98	44,98	44,98
5.	Dumai Selatan	73,50	73,50	73,50
6.	Dumai Timur	47,52	47,52	47,52
7.	Dumai Kota	13,0	13,0	13,0
	Total	1,727,38	1,727,38	1,727,38

*Sumber: Badan Statistik Kota Dumai 2018-2020*

**D. Jumlah Penduduk Kota Dumai**

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu wilayah dan sangat menentukan kelancaran suatu wilayah dan keberhasilan suatu pembangunan. Penduduk Kota Dumai selalu mengalami perkembangan yang pesat setiap tahun nya, seiringan dengan meningkatnya taraf ekonomi masyarakat yang memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan penduduk Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2018-2020.

**Tabel II.2**

**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin**

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Bukit Kapur	26.693	24.871	51.564
Medang Kampai	8.667	8.127	16.794
Sungai Sembilan	21.772	19.966	41.738
Dumai Barat	22.525	21.767	44.292
Dumai Selatan	27.043	25.748	52.791
Dumai Timur	35.413	33.517	68.930
Dumai Kota	20.656	20.017	40.673
<b>Total</b>	162.769	154.013	316.782

*Sumber: Situs Resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai 2018-2020*

## E. Sejarah Dinas Perhubungan Kota Dumai

Dinas Perhubungan Kota Dumai selaku salah satu instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam upaya memajukan dan membangun sektor transportasi, dengan banyaknya perkembangan pembangunan yang mencapai ke pelosok atau ke pinggir Kota Dumai, ditandai dengan tingginya mobilitas orang/barang melakukan aktivitas perjalanan/pergerakan dari satu tempat ke tempat lain tiap hari secara rutinitas, dan juga pertumbuhan lalu lintas pada saat ini sudah mengalami peningkatan, hal ini diakibatkan adanya penambahan sarana (kendaraan) dari tahun ke tahunnya yang mengalami peningkatan secara signifikan, serta pertumbuhan ekonomi yang menggairahkan dimasa yang akan datang ditandai dengan banyaknya bangunan-bangunan yang baru tumbuh di Kota Dumai seperti pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ro-Ro, Terminal Barang, Terminal Penumpang, keberadaan Pelabuhan Dumai yang merupakan pintu gerbang mengeksport minyak bumi dan CPO, serta peningkatan status Bandar Udara Pinang Kampai Dumai dari khusus menjadi bandar udara domestik untuk melayani kepentingan masyarakat umum sehingga maskapai penerbangan sipil membuka jalur penerbangan domestik, dengan adanya di buka jalur penerbangan diharapkan investor masuk ke Kota Dumai. Berdasarkan Memorandum Of Understanding (Mou) antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pertamina UP II Dumai tentang Pinjam Pakai Pengelolaan Bandar Udara Pinang Kampai Dumai Nomor 1004/E12000/2008-SO dan Nomor 553/DPHB /2008/914, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009 Bandar Udara Pinang Kampai Dumai resmi di kelola oleh Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Perhubungan Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dumai yang berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Urusan Tugas Unit Pelaksana Teknis Kota Dumai.

Dinas Perhubungan Kota Dumai semula dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Tk. II Kabupaten Bengkalis dari Tahun 1990 sampai dengan 1999 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang LLAJ kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II, serta kaitannya dengan uji coba penyerahan sebagian urusan di bidang LLAJ Tingkat I kepada Daerah Tingkat II dalam rangka "percontohan" di bidang Perhubungan Darat. Pada Tahun 1999 terbentuklah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai yang semulanya sebagai Kota Administratif Dumai merupakan bagian Daerah Tk. II Kabupaten Bengkalis, masih memakai nama Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Tk. II Kotamadya Dumai

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 maka Pemerintah Kota Dumai mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Dumai, maka DLLAJ Tk. II Kotamadya Dumai berubah menjadi Dinas Perhubungan Kota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dumai yang terdiri dari Bidang Perhubungan Darat, Bidang Perhubungan Laut dan Bidang Perhubungan Udara dan Telekomunikasi. Untuk menunjang pelaksanaan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Dumai telah disahkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 14 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2001 berubah menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Kota Dumai. Untuk menunjang pelaksanaan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Dumai telah disahkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2005 berubah menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

## **F. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Dumai**

### **a. Visi Dinas Perhubungan Kota Dumai**

Visi Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah “Terwujudnya pelayanan perhubungan yang modern, handal dan berkelanjutan menuju masyarakat yang makmur dan madani”.<sup>24</sup>

### **b. Misi Dinas Perhubungan Kota Dumai**

#### **1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Perhubungan**

Pembangunan sistem transportasi dan telekomunikasi yang terpadu melalui suatu kajian yang menyeluruh (komprehensif), yang mampu menjangkau seluruh kawasan kota, membuka aksesibilitas wilayah dengan menghubungkan wilayah dalam kota, sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian rakyat. Peningkatan mutu pelayanan transportasi dititik beratkan pada upaya peningkatan aspek keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan melalui pelayanan sarana transportasi umum yang modern, handal dan berkelanjutan.

#### **2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Perhubungan**

Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, pembenahan, pengembangan, dan peningkatan sarana, prasarana serta fasilitas transportasi dan telekomunikasi guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat untuk mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.

<sup>24</sup> <https://dishub.dumaikota.go.id/visi-dan-misi/>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2021, jam 16:55 Wib.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Insan Perhubungan**

Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Insan Perhubungan yang tangguh dan berwibawa dengan mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat, serta meningkatkan kinerja aparatur (SDM) Dinas Perhubungan yang berpengetahuan, terampil dan menguasai teknologi, bermoral, agamis, berbudaya dan berperilaku.

**G. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Dumai**

Dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka sejumlah tujuan dan sasaran yang lebih terarah juga perlu ditetapkan. Adapun tujuan dan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM Pehubungan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di sektor Perhubungan dan Kesekretariatan;
2. Melaksanakan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
3. Melaksanakan Rehabilitas/pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
4. Melaksanakan Peningkatan Pelayanan Angkutan;
5. Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
6. Tersedianya Fasilitas dan Perlengkapan Jalan yang Memadai;
7. Optimalnya kinerja Pengujian Kendaraan Bermotor;

Sedangkan sasaran dan yang ingin dicapai adalah :

1. Aparatur Perhubungan yang Profesional;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Terencana dan Temonitornya Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
3. Terpeliharanya Peralatan Beserta Pengujian, Pelabuhan dan Terminal serta Sarana dan Prasarana Perhubungan;
4. Terjadinya Peningkatan Pelayanan Angkutan Kepada Masyarakat;
5. Penataan dan Pengembangan Trayek Angkutan Umum;
6. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan Pagar Pengaman Jalan;
7. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dan Mobil Crane;

## H. Denah Lokasi Dinas Perhubungan Kota Dumai



**Gambar III. 1: Denah Lokasi Dinas Perhubungan Kota Dumai**

## I. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Dumai

Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat dijelaskan melalui gambar di bawah ini:

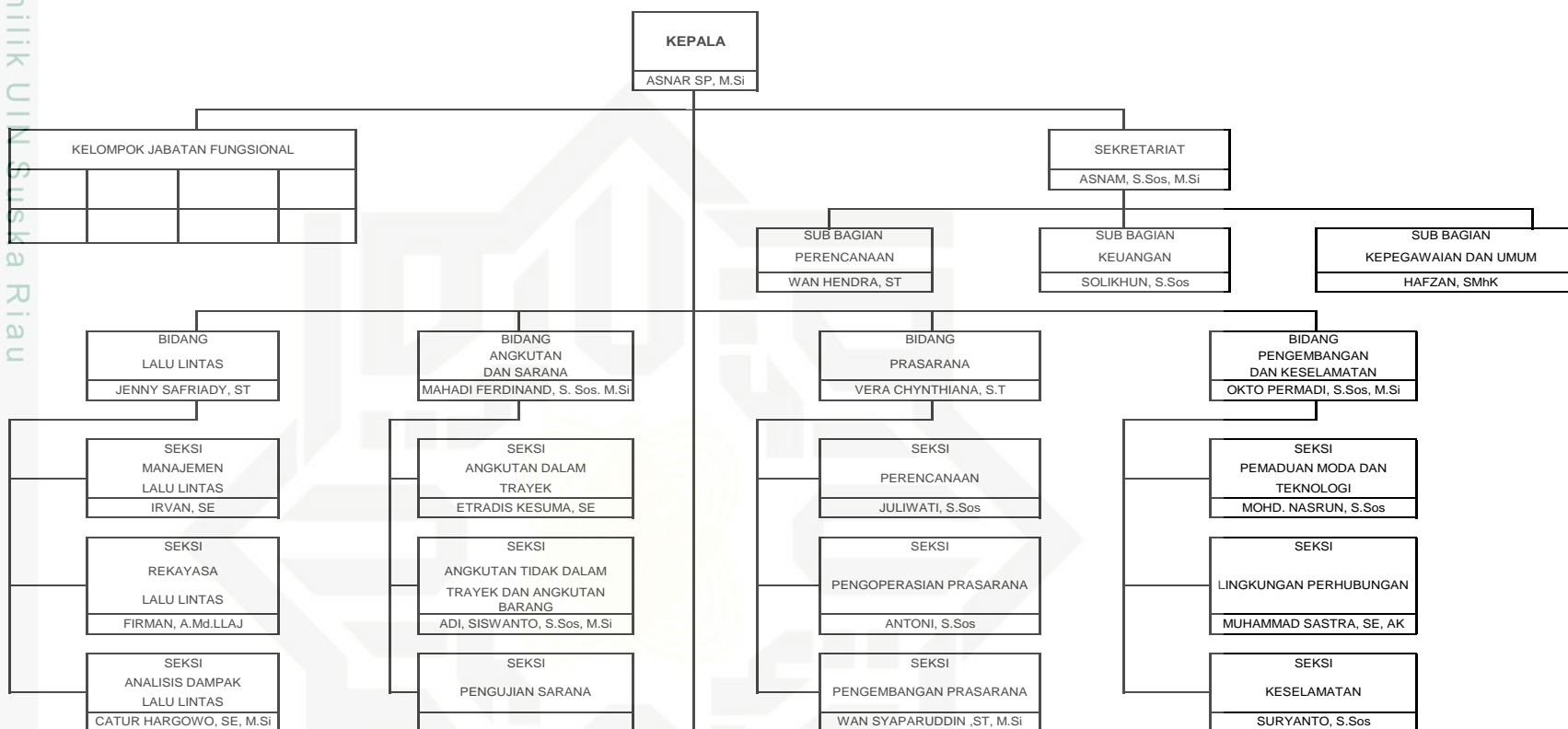


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

**TABEL II.3**  
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Dumai  
**BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 59 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI**



## J. Logo Dinas Perhubungan Kota Dumai



**Gambar III. 2 Logo Dinas Perhubungan Kota Dumai**

Logo Dinas Perhubungan adalah suatu bentuk simbolis yang menggambarkan keluarga besar Dinas Perhubungan. Logo terdiri dari bentuk lingkaran yang mempunyai unsur-unsur roda bergigi, jangkar, burung Garuda, dan bulatan bumi.

Arti dari unsur logo ialah :

- Roda bergigi berarti matra Perhubungan Darat.
- Jangkar berarti matra Perhubungan Laut.
- Burung Garuda berarti matra Perhubungan Udara.
- Bulatan bumi berarti lingkup pelayanan jasa Perhubungan.

Warna Logo terdiri dari warna biru langit (*cerulean blue*) berarti kedamaian dan kuning berarti keagungan.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> <https://dishub.dumaikota.go.id/lambang-dinas-perhubungan/>. Diakses pada tanggal 18 Juni 2021, jam 08:45 Wib.

## **K. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Dumai**

Untuk mewujudkan visi dan merealisasikan misi Dinas Perhubungan Kota Dumai perlu ditetapkan kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan. Selain memajukan bidang transportasi, juga memberikan andil yang besar bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ketersediaan sistem jaringan telekomunikasi yang handal dan ketersediaan informasi yang akurat serta dapat dipercaya akan sangat membantu kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya dan daerah pada khususnya.

## **L. Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kota Dumai**

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai, Maka Dinas Perhubungan Kota Dumai mempunyai Kedudukan, tugas pokok dan Fungsi sebagai berikut :

### **1. Kedudukan**

- a. Dinas Perhubungan merupakan unsur penunjang tugas Walikota di bidang Perhubungan.
- b. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **2. Tugas Pokok**

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

### 3. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perhubungan Kota Dumai mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perhubungan;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di bidang perhubungan;
- c. Perencanaan program/kegiatan di bidang perhubungan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengaturan dan pengendalian lalu lintas, serta patroli dan pengawalan lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan kelaikan sarana dan prasarana perhubungan;
- g. Pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perhubungan;
- h. Pembinaan dan pemberian perizinan di bidang perhubungan;
- i. Pembinaan dan pelaksanaan pemungutan retribusi di bidang perhubungan;
- j. Pembinaan dan penetapan standarisasi pelayanan di bidang perhubungan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Pembinaan dan pengelolaan data dan informasi di bidang perhubungan;
- l. Pencegahan dan penanggulangan kecelakaan di bidang perhubungan;
- m. Pembinaan dan penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta program keselamatan di bidang perhubungan;
- n. Pembinaan disiplin serta pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum di bidang perhubungan;

**4. Kewenangan**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perhubungan Kota Dumai mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan barang dan jasa di bidang Industri dan Perdagangan;
- b. Mendorong penyelenggaraan barang kemitraan industri kecil, menengah dan sektor ekonomi lainnya;
- c. Penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- d. Penyelenggaraan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral;
- e. Penyelenggaraan distribusi bahan pokok;
- f. Pemberian izin industri dan kawasan Industri;
- g. Pemberian perizinan dibidang industri dan Perdagangan, termasuk izin kawasan industri;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen untuk pengusaha kecil dan keterampilan pengerajin;
- i. Memfasilitasi permodalan bagi industri kecil dalam dalam pengembangan usaha;
- j. Pengendalian pencemaran limbah industri;
- k. Pengawasan dan pengendalian industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan moral;
- l. Fasilitas kegiatan distribusi bahan pokok;
- m. Penetapan tara dan tara isi ulang alat UTTP ( Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perdagangan );
- n. Pemberian izin Gudang;
- o. Penertiban SKA ( Surat Keterangan Asal ) barang;
- p. Memfasilitasi pemodal, aspek pemodal, manajemen, kelembagaan, kemitraan dan perniagaan, pemasaran untuk tubuh dan berkembangnya koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM);
- q. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan industri dan perdagangan Daerah;
- r. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang Industri dan Perdagangan yang wajib dilaksanakan oleh Kota;
- s. Penyusunan rencana industri dan Perdagangan Daerah;
- t. Perizinan di bidang industri dan Perdagangan Daerah;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- u. Penyelenggaraan ekspor dan impor hasil produk Industri dan Perdagangan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- v. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa Industri dan Perdagangan;
- w. Penyelenggaraan sistem Industri dan Perdagangan;
- x. Penyelenggaraan promosi Industri dan Perdagangan;
- y. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama Industri dan Perdagangan;
- z. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah;

## 5. Personil

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kota Dumai sebanyak 378 orang terdiri dari 78 pegawai negeri sipil dan 300 tenaga honor/kontrak.

**Tabel II.4**  
**Jumlah Pegawai**

No.	Status Pegawai	Jumlah Pegawai
1.	Pegawai Negeri Sipil	78 Orang
2.	Honor	300 Orang
<b>Total</b>		<b>378 orang</b>

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai 2021.*

Berdasarkan status pendidikannya Pegawai Dinas Perhubungan Kota Dumai terbagi sebagai berikut :

**Tabel II.5**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Pendidikan**

No.	Status Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 3	0
2.	Strata 2	8
3.	Strata 1	22
4.	Dimploa 4	1
5.	Diploma 3	9
6.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	0
7.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	37
8.	Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)	0
9.	Madrasah Aliyah (MA)	0
10.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
11.	Sekolah Dasar (SD)	0
<b>Total</b>		<b>78</b>

*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai 2021.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Teori Pengawasan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengawasan memiliki definisi suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepihak yang dibawahnya. Lembaga administrasi negara mendefinisikan pengawasan sebagai proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.<sup>26</sup>

Menurut Siagian, Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>27</sup> Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>28</sup> Jadi tujuan pengawasan hanyalah untuk mengetahui secara cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi itu. Kata yang semestinya dalam pengertian diatas adalah tolak ukur yang mengandung tiga segi, yaitu: sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain

<sup>26</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Cahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Yogyakarta : Pustaka Yusdisia, 2016), h. 13.

<sup>27</sup> S.P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta : Gunung Agung, 1986), h. 112.

<sup>28</sup> Ernie Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 317.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektifitas).<sup>29</sup>

### 1. Tujuan Pengawasan

Pengawasan berkaitan erat dengan fungsi manajemen lainnya, terutama dengan perencanaan. Pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa kegiatan dan perencanaan dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan, pengawasan diadakan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan intruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitankesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.

---

<sup>29</sup> Angger Sigit Pramukti, Meylani Cahyaningsih, *Op. cit*, h. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Pengawasan

Sebuah pengawasan jika dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh sebuah organisasi maka pengawasan tersebut akan memberikan manfaat yang sangat berguna bagi organisasi. Menurut Sondang P. Siagian manfaat dari pengawasan yaitu:

1. Tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada.
2. Dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif.
3. Memberikan pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional.
4. Langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan.
5. Tindakan preventif apa yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut.

## 3. Macam-Macam Pengawasan

Terdapat macam-macam pengawasan diantaranya sebagai berikut:

### a. Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya.<sup>30</sup>

b. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.

c. Pengawasan Preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/ kesalahan dalam pelaksanaan.

d. Pengawasan Represif<sup>31</sup>

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya

<sup>30</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), h. 62.

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 64.

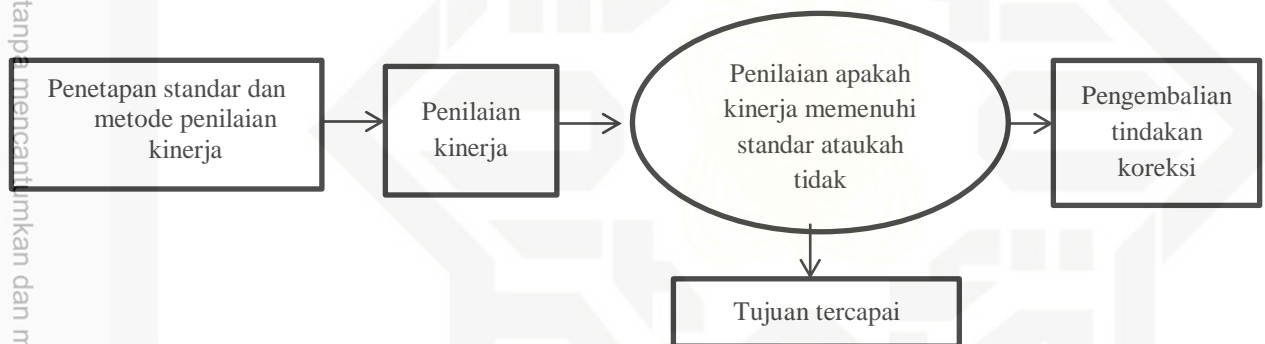


pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

#### 4. Langkah-langkah Pengawasan

Terdapat beberapa langkah-langkah dalam proses pengawasan diantaranya:

1. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja
2. Penilaian kinerja
3. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak
4. Pengembalian tindakan koreksi.<sup>32</sup>



**Gambar III. 3 Proses Pengawasan**

Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan adalah suatu usaha pimpinan yang menginginkan agar setiap pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dengan kata lain bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Tujuan pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah adalah agar penyelenggaraan pemerintahan di Daerah

<sup>32</sup> Ernie Tisnawati Sule, *Op.Cit*, h. 321.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintah yaitu kesejahteraan bagi masyarakat daerah itu dapat terlaksana.<sup>33</sup>

## B. Teori Penegakan Hukum

### 1. Pengertian

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>34</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Penegakan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

#### 1. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan

<sup>33</sup> Jum Angraini, *Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, (Jakarta : Tama Jagakarsa, 2011), h. 60.

<sup>34</sup> Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), h. 32

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

#### 2. Dintinjau dari sudut obyeknya.

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

### 2. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah <sup>35</sup>:

#### 1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 42.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

#### 2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

#### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Faktor ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi ini cenderung pada hal-hal praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

## 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

## C. Teori Transportasi

### 1. Pengertian Transportasi

Transportasi berasal dari kata *transportation*, dalam bahasa Inggris yang memiliki arti angkutan, yang menggunakan suatu alat untuk melakukan pekerjaan tersebut, atau dapat pula berarti suatu proses pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan suatu alat bantu kendaraan darat, laut, maupun udara, baik umum maupun pribadi dengan menggunakan mesin atau tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan mesin.<sup>36</sup> Bisa juga di artikan sebagai kegiatan mengangkut dan memindahkan muatan (barang dan orang/manusia) dari suatu tempat (tempat asal) ketempat lainnya (tempat tujuan).<sup>37</sup> Transportasi memiliki beberapa unsur diantaranya meliputi :

1. Ada muatan yang diangkut.
2. Tersedia kendaraan sebagai pengangkutnya.
3. Ada jalanan yang dapat dilalui.
4. Ada terminal asal dan terminal tujuan.
5. Sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.<sup>38</sup>

Sistem transportasi dari suatu wilayah dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari prasarana/sarana dan sistem pelayanan yang memungkinkan adanya pergerakan keseluruhan wilayah, sehingga : terakomodasinya mobilitas penduduk, dimungkinkan adanya pergerakan barang, dimungkinkan akses ke semua wilayah.

Pengangkutan memberikan jasa kepada masyarakat, yang disebut jasa angkutan. Jasa angkutan merupakan keluaran (*output*) perusahaan angkutan yang bermacam-macam jenisnya sesuai banyaknya jenis alat angkutan (seperti jasa pelayaran, jasa kereta api, jasa penerbangan, jasa angkutan bus dan lain-lain). Sebaliknya jasa angkutan merupakan salah

<sup>36</sup> Mariangan Masry Simbolon, *Op. cit*, h. 2.

<sup>37</sup> Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), h. 7.

<sup>38</sup> M. N Nasution, *Op. cit*, h. 6.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu faktor masukan (*input*) dari kegiatan produksi, perdagangan, pertanian dan kegunaan lainnya.<sup>39</sup>

## 2. Undang – Undang Yang Mengatur Tentang Transportasi

Pengangkutan darat dengan kendaraan umum diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49). Karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan yang berkembang kini, undang-undang ini kemudian tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96) yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 22 Juni 2009. Menurut ketentuan undang-undang yang baru tersebut, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk pengangkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran (pasal 1 angka 8 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).<sup>40</sup>

Dalam dunia pengangkutan agar dapat berjalan dengan baik maka diperlukan suatu peraturan yang khusus membahas tentang pengangkutan, oleh karena itu dibuatlah hukum pengangkutan atau biasa disebut dengan hukum pengangkutan niaga. Hukum pengangkutan diatur dalam buku I

<sup>39</sup> Sakti Adji Adisasmita, *Op. cit*, h. 8.

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab V Pasal 90-98 KUHD, Sedangkan dasar hukumnya adalah UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.<sup>41</sup>

Perusahaan pengangkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya pengangkutan oleh orang dan/atau pengirim barang (pasal 186) karcis penumpang atau surat pengangkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya pengangkutan. Kewajiban utama pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang serta menerbitkan dokumen pengangkutan dan sebagai imbalan haknya memperoleh biaya pengangkutan dari penumpang atau pengirim barang. Pihak-pihak dapat juga memperjanjikan bahwa disamping kewajiban utama, pengangkut mempunyai kewajiban pelengkap, yaitu :

- a. Menjaga serta merawat penumpang dan memelihara barang yang diangkut dengan sebaik-baiknya.
- b. Melepaskan dan menurunkan penumpang ditempat pemberhentian atau ditempat tujuan dengan aman dan selamat.
- c. Menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan utuh, lengkap, tidak rusak, atau tidak terlambat.<sup>42</sup>

Perusahaan pengangkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim, atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan. Selama

<sup>41</sup> <http://rikiseptiawan180991.blogspot.com/2012/12/hukum-pengangkutan-niaga>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2021, jam 13:30 Wib.

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga, Op. cit*, h. 152.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan angkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya dalam tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum. Jadi, sudah sepatutnya apabila kepada perusahaan pengangkutan umum dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim yang timbul karena pengangkutan yang dilakukannya. Dengan beban tanggung jawab ini, pengangkut didorong supaya berhati-hati dalam melaksanakan pengangkutan. Untuk mengantisipasi tanggung jawab yang mungkin timbul, perusahaan pengangkutan umum wajib mengangsuransikan tanggung jawabnya.<sup>43</sup>

Tanggung jawab perusahaan pengangkutan umum terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai ditempat tujuan yang telah disepakati. Demikian juga halnya dengan tanggung jawab terhadap pemilik barang (pengirim) dimulai sejak barang diterima untuk diangkut sampai diserahkan barang kepada pengirim atau penerima. Besarnya ganti kerugian adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga. Kerugian secara nyata ini adalah ketentuan kontrak yang tidak boleh dilanggar oleh pengangkut yang menguntungkannya karena ketentuan ini bersifat memaksa (*dwingend recht*) tidak termasuk dalam pengertian kerugian yang secara nyata, antara lain :

- a. Keuntungan yang diharapkan akan diperoleh.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kekurang nyamanan akibat kondisi jalan atau jembatan yang dilalui selama dalam perjalanan; dan
- c. Biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati.

Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan. Ini dapat diartikan muatan (penumpang dan barang) yang ditinggalkan di jalan itu menderita kerugian, pengemudi dan pemilik kendaraan wajib membayar ganti kerugian bersama-sama.

Pengemudi bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang atau pemilik barang atau pihak ketiga yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Dalam hal kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu orang pengemudi, bertanggung jawab atas kerugian materi yang ditimbulkannya ditanggung secara bersama-sama.<sup>44</sup>

Mengapa tidak mempersoalkan perusahaan pengangkutan umum sebagai pengangkut yang bertanggung jawab? Secara hukum, perusahaan pengangkutan umum tetap bertanggung jawab membayar ganti kerugian karena pengemudi adalah karyawan perusahaan pengangkutan umum. Akan tetapi, bukan berarti pengemudi dibebaskan begitu saja dari tanggung jawab akibat kesalahan/kelalaiannya. Dalam hal ini, pengemudi dapat membayar ganti kerugian langsung kepada penumpang atau pemilik

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang atau membayar kepada perusahaan pengangkutan umum untuk dibayarkan kepada penumpang dan/atau pemilik barang yang dirugikan.

Pengangkut berwenang melalui untuk menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut ditempat pemberhentian terdekat apabila ternyata penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan pengangkutan. Pertimbangan yang digunakan untuk dapat menurunkan penumpang atau barang yang diangkut benar-benar harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan norma kepatuhan.<sup>45</sup>

### 3. Fungsi Transportasi

Pengangkutan berfungsi sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the service sector*) bagi perkembangan ekonomi. Fasilitas pengangkutan harus dibangun mendahului proyek-proyek pembangunan lainnya.

Perluasan dermaga di pelabuhan didahulukan daripada pembangunan pupuk yang akan dibangun, guna melancarkan pengiriman peralatan pabrik dan bahan baku serta penyaluran hasil produksi ke pasar setelah pabrik beroperasi.

Transportasi manusia atau barang biasanya bukanlah merupakan tujuan akhir, tetapi hal itu dilakukan untuk mencapai tujuan lain, oleh karena itu, permintaan atas jasa transportasi disebut sebagai permintaan

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

turunan (*derived demand*) yang timbul akibat adanya permintaan akan komoditi atau jasa lain.

Pada dasarnya permintaan jasa transportasi diturunkan dari :

- a. Kebutuhan seseorang untuk berjalan dari satu lokasi ke lokasi lainnya untuk melakukan suatu kegiatan (misalnya bekerja, sekolah, dll).
- b. Permintaan akan angkutan barang tertentu agar tersedia di tempat yang diinginkan.

Untuk menunjang perkembangan ekonomi yang mantap perlu dicapai keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan. Jika penyediaan jasa angkutan lebih kecil dari pada permintaanya, akan terjadi kemacetan arus barang dan penumpang yang dapat menimbulkan kegoncangan harga di pasaran. Sebaliknya, jika penawaran jasa angkutan melebihi permintaanya maka akan timbul persaingan tidak sehat yang akan menyebabkan banyak perusahaan angkutan rugi dan menghentikan kegiatannya, sehingga penawaran jasa angkutan berkurang, selanjutnya menyebabkan ketidak lancar arus barang dan kegoncangan harga di pasaran.<sup>46</sup>

#### 4. Sifat – Sifat Permintaan Jasa Angkutan

Terdapat beberapa sifat khusus yang melekat pada permintaan jasa transport yang membedakan dengan permintaan terhadap barang-barang lainnya, yaitu sebagai berikut :

<sup>46</sup> Adji Adisasmita, *Op. cit*, h. 11.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) *Derived demand*. Permintaan akan jasa angkutan, merupakan suatu permintaan yang bersifat turunan, saduran atau dalam istilah ekonomi lazim disebut “*derived demand*”. Dengan demikian permintaan akan jasa transport baru akan ada, apabila ada faktor-faktor yang mendorongnya. Permintaan jasa transport tidak berdiri sendiri, melainkan tersembunyi dibalik kepentingan orang lain. Permintaan akan jasa angkutan, baru akan timbul apabila ada hal-hal dibalik permintaan itu, misalnya keinginan untuk rekreasi, keinginan untuk sekolah atau berbelanja, keinginan untuk melihat keluarga yang sakit, dan sebagainya.
- b) Permintaan akan jasa transport, pada dasarnya adalah seketika / tidak mudah untuk digeser atau ditunda dan sangat dipenuhi oleh fluktuasi waktu, yang dapat bersifat harian, mingguan (Sabtu dan Minggu untuk tujuan rekreasi), bulanan atau tahunan (musim libur anak sekolah, Lebaran, atau Natalan).
- c) Permintaan jasa transport sangat dipengaruhi oleh elastisitas pendapatan. Perilaku hukum Egel berlaku disini, dimana Egel mengatakan bahwa apabila pendapatan dari seseorang naik, maka orang tersebut akan secara sebanding mengurangi pengeluarannya dengan barang-barang yang lebih mewah atau sekunder.
- d) Pada hakikatnya tidak tanggap / perasa terhadap perbedaan tingkat biaya transport untuk pengangkutan barang. Ini berarti permintaan penumpang bersifat *elastis*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Jasa transport adalah jasa campuran (produk *mixed*) permintaan akan jasa transport adalah kompleks karena permintaan tersebut tidak hanya dilandasi oleh keinginan untuk memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi banyak variable-variabel lain yang mempengaruhi keinginan untuk memindahkan barang tersebut seperti kecepatan, ketepatan, kenyamanan, keterandalan dan sebagainya.

Oleh karena itu, permintaan dan pemilihan pemakai jasa angkutan (*user*) akan jenis jasa transport ini akan ditentukan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

- a) Sifat-sifat dari muatan (*physical characteristics*)

Barang-barang yang nilainya tinggi terpadu dengan volume yang tidak besar, seperti komponen-komponen elektronik untuk peralatan yang mahal, baju-baju terutama baju baru (*fashion goods*) dan lain-lain, biasanya diangkut melalui transportasi udara barang-barang bernilai rendah dipadu dengan volume yang besar, biasanya di transport melalui laut, jalan raya dan jalan baja (kereta api).

- b) Biaya Transport

Makin rendah biaya transport makin banyak permintaan akan jasa transport. Tingkat biaya transport merupakan faktor penentu dalam pemilihan jenis jasa transport.

- c) Tarif Transport

Tarif Transport yang ditentukan oleh berbagai macam moda transport, untuk tujuan yang sama, seperti tarif angkutan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jakarta – Banten yang ditawarkan untuk jasa kereta api, perusahaan bus, perusahaan penerbangan kan mempengaruhi pemilihan moda transportasi.

d) Pendapatan pemakai jasa transport (*user*)

Apabila pendapatan penumpang naik, maka akan lebih banyak jasa transport yang akan dibeli oleh para penumpang.

e) Kecepatan angkutan pemilihan ini sangat tergantung pada faktor waktu yang dimiliki oleh penumpang. Bagi mereka yang mempunyai waktu sedikit, biasanya mencari atau memilih moda transportasi yang cepat, jadi faktor kecepatan yang menentukan pemilihan moda transport. Sebaliknya, mereka yang mempunyai waktu yang banyak, biasanya memilih moda transport yang memberikan suatu kenyamanan (*relaxation*). Kecepatan, terutama penting untug barang-barang yang mudah busuk/rusak, atau untuk segera dapat memanfaatkan perbedaan harga (antar pasar).

f) Kualitas pelayanan

Kualitas pelayanan terdiri dari frekuensi, pelayanan baku (*standard of service*), kenyamanan, ketepatan (*realbility*), keamanan, dan keselamatan.

5. Tahap Perencanaan Transportasi

Sebelumnya telah diutarakan bahwa perencanaan transportasi memiliki tahapan dan batasan waktu, sesuai dengan karakteristik dari rencana (bagaimana sifat dan bagaimana cara merencanakan) serta faktor-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor pendukungnya, maka bagian ini dijelaskan berbagai batasan waktu perencanaan beserta apa yang direncanakan, termasuk faktor pendukungnya :

1. Rencana perpektif atau rencana jangka panjang (20-30 tahun).
2. Biasanya menunjukkan arah umum perkembangan perekonomian nasional dan perubahan structural yang penting.
3. Rencana jangka menengah (*medium term plan*), sekitar 5 tahun
4. Rencana jangka pendek (*short term plan*), merupakan rencana tahunan yang dicerminkan dalam budget pemerintah.

#### D. Teori Angkutan Umum

Masalah transportasi pada dasarnya terjadi karena adanya interaksi yang sangat intern antara komponen-komponen sistem transportasi, dimana interaksi yang terjadi berada pada kondisi di luar kontrol, sehingga terjadi ketidak seimbangan antar transportasi demand dan transport supply ataupun faktor-faktor relefan lainnya yang pada dasarnya menyebabkan pergerakan manusia dan barang menjadi tidak efisien dan efektif. Adanya permasalahan transportasi sudah lama ada, namun pemecahannya boleh dikatakan baru.

Sementara itu pemecahnya sendiri berkembang sangat pesat.<sup>47</sup>

Angkutan pada dasarnya merupakan sarana untuk memindahkan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain.

Angkutan (transport) adalah kegiatan orang dan barang dari suatu tempat ketempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan).

<sup>47</sup> Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, (Bandung : ITB, 2002), h. 39.



Tujuan pelayanan angkutan umum adalah memberikan pelayanan yang aman, nyaman dan murah. Pada masyarakat yang mobilasinya semakin meningkat.<sup>48</sup>

Pada dasarnya sistem transportasi perkotaan terdiri dari sistem angkutan barang umum. Selanjutnya sistem angkutan penumpang sendiri bisa dikelompokkan menurut penggunaannya dan cara pengoperasiannya yaitu :

- a. Angkutan pribadi yaitu kendaraan yang dimiliki oleh perorangan dan dioperasikan untuk kepentingan pribadi, dengan menggunakan prasarana baik pribadi maupun prasarana umum.
- b. Angkutan umum yaitu angkutan yang dimiliki oleh operator yang bisa digunakan umum dengan persyaratan tertentu.

Terdapat dua sistem pemakaian angkutan umum yaitu :

- a. Sistem sewa yaitu kendaraan bisa dioperasikan oleh operator maupun penyewa, dalam hal ini tidak ada rute dan jadwal tertentu yang harus diikuti oleh pemakai. Sistem sering disebut juga sebagai *demanresponsive* sistem karena pengguna yang tergantung pada permintaan. Contoh sistem ini adalah jenis angkutan taksi.
- b. Sistem penggunaan bersama yaitu kendaraan dioperasikan operator dengan rute dan jadwal yang tetap. Sistem ini terdapat dua jenis sistem transit yaitu :

- 1) Para transit yaitu jadwal dan rute yang bisa dirubah sesuai pengguna perorangan, contohnya taksi.

---

<sup>48</sup> Ibid, h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Masa transit yaitu jadwal dan tempat pemberhentian lebih pasti, contoh bus.

Dengan demikian jelas bahwa jumlah pengguna angkutan pada suatu kota pada dasar dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu :

- 1) Kondisi perekonomian dari kota yang dimaksud.
- 2) Kondisi pelayanan angkutan umum.

### 1. Pengertian Becak

Becak dari bahasa Hokkien: *be chia* “kereta kuda” adalah suatu moda transportasi beroda tiga yang umum ditemukan di Indonesia dan juga di sebagian Asia. Kapasitas normal becak adalah dua orang penumpang dan seorang pengemudi.

Menjadi pengemudi becak merupakan salah satu cara untuk mendapatkan nafkah yang mudah, sehingga jumlah pengemudi becak di daerah yang angka penganggurannya tinggi dapat menjadi sangat tinggi, dan akan menimbulkan berbagai kesamrawutan lalu lintas. Karena itu becak di Jakarta sekitar akhir dasawarsa 1980-an. Alasan resminya antara lain kala itu bahwa becak menampilkan “eksploitasi manusia atas manusia”. Di kawasan Jatiasih dan Cibubur, becak disebut dengan nama *kereta*, di Jonggol, becak disebut dengan nama *kreta panumpang* dan di Depok disebut dengan nama *bicak*.

Ternyata asal-usul becak dari Jepang. Munculnya kendaraan yang ditarik dengan tenaga manusia itu, untuk pertama kalinya hanya kebetulan saja. Tahun 1869, seorang pria Amerika yang menjabat pembantu di

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jepang, berjalan-jalan menikmati pemandangan di Kota Yokohama. Suatu saat ia berpikir , bagaimana cara istrinya yang kakinya cacat bisa ikut berjalan-jalan?. Tentu diperlukan sebuah kendaraan. Kendaraan itu, pikirnya, tidak usah ditarik kuda karena hanya untuk satu penumpang saja. Kemudian ia mulai menggambar kereta kecil tanpa atap di atas secarik kertas. Rancangan tersebut ia kirimkan kepada sahabatnya, Frank Pollay. Pollay membuatnya sesuai rancangan Goble lalu membawanya ke seorang pandai besi bernama Obadiah Wheeler. Jadilah becak.

Becak adalah salah satu moda transportasi paling umum di Kota Dumai. Becak merupakan alat angkutan yang ramah lingkungan karena tidak menyebabkan polusi udara (kecuali becak bermotor tentunya). Selain itu, becak tidak menyebabkan kebisingan dan juga dapat dijadikan sebagai obyek wisata bagi turis-turis mancanegara.

Meskipun begitu, kehadiran becak di perkotaan dapat mengganggu lalu lintas karena kecepatannya yang lamban dibandingkan dengan mobil maupun sepeda motor. Selain itu, ada yang menganggap bahwa becak tidak nyaman dilihat, mungkin karena bentuknya yang kurang modern. Satu-satunya kota di Indonesia yang secara resmi melarang keberadaan becak adalah Jakarta. Penggantinya adalah, ojek,bajaj dan Kancil.

## 2. Pengertian Becak Bermotor

Becak Bermotor merupakan salah satu bentuk moda transportasi publik. Transportasi ini sejatinya adalah bentuk becak yang dimodifikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan mesin. Umumnya, becak bermotor terbentuk mobil mini beroda tiga. Bodinya berupa baja dengan atau tanpa atap. Di bagian depan transportasi ini ditempati oleh sopir. Sedangkan di bagian belakangnya penumpang yang bisa berjumlah 2-3 penumpang. Ia digerakkan oleh mesin 2 tak.

Aslinya becak bermotor berasal dari Italia. Ia diciptakan oleh Corradino D'Ascanio, desainer penerbangan dan penemu Veespa pada tahun 1947. Ia menciptakan transportasi ini untuk kepentingan ekonomi Italia pasca Perang Dunia Kedua. Dari Italia inovasi ciptaanya berkembang, terutama ke India dan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara becak bermotor berbasiskan produksi Daihatsu Midget. Kendaraan ini diperkenalkan pada 1957.

Hampir semua Negara Asia Tenggara mempunyai becak bermotor. Ada yang bentuknya seperti bajaj India, ada yang seperti motor mendorong gerobak, bahkan ada yang mampu menampung hingga 12 penumpang.

Di Indonesia ada dua jenis becak yang lazim digunakan, yaitu :

- 1) Becak dengan pengemudi di belakang, jenis ini biasanya ada di Jawa.
- 2) Becak dengan pengemudi di samping, Jenis ini biasanya ditemukan di Sumatra. Untuk becak jenis ini (Becak dengan pengemudi di samping) dapat dibagi lagi ke dalam dua sub-jenis, yaitu :
  - a) Becak kayuh, becak yang menggunakan sepeda sebagai kemudi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Becak Bermotor, becak yang menggunakan sepeda motor sebagai penggerak.

Di beberapa Negara lain masih ada becak yang pengemudinya berada di depan, sebagaimana dikembangkan di India, Pakistan dan Bangladesh. Konsep ini yang kemudian di kembangkan dalam bajaj yang diambil dari India pada tahun 1970 an. Pada awalnya digunakan mesin dua langkah Rex buatan Jerman yang sederhana berukuran silinder kecil yang dipasang pada becak dayung. Kemudian berkembang menggunakan sepeda kumbang Gobel yang dikayuh untuk menghidupkannya dan beberapa merk lainnya, sekarang digunakan motor produksi baru yang banyak dipasarkan di Indonesia untuk menggerakkan becak tersebut.

Sepeda motor yang digunakan di Kota Dumai untuk dijadikan becak bermotor ini biasanya adalah sepeda motor merek Honda, Suzuki dan Yamaha, dll.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Becak Bermotor Yang Melintas Di Kawasan Tertib Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai sudah diterapkan dan pihak Dinas Perhubungan juga sudah membentuk tim khusus atau satuan petugas. Pengawasan sudah berjalan, tetapi belum efektif dan maksimal dan belum ada sanksi yang secara tegas diberikan kepada pemilik becak bermotor, walaupun ada pemilik becak bermotor yang melintasi di ruas jalan pada kawasan tertib lalu lintas Kota Dumai hanya diberikan teguran.
2. Adapun faktor-faktor yang menghambat Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Becak Bermotor Yang Melintas Di Kawasan Tertib Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai adalah sebagai berikut : Faktor Komunikasi, Faktor Sumberdaya, Faktor Dana dan Anggaran, serta Faktor Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggar Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai Yang Belum Tegas.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan agar Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Becak Bermotor Yang Melintas Di Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Perlunya sosialisasi yg dilaksanakan Dinas Perhubungan terhadap Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai. Agar pemilik becak bermotor dapat memahami dengan jelas dan selalu mematuhi kebijakan dan aturan yang sudah diterapkan.
2. Untuk Pemilik Becak Bermotor di Kota Dumai agar mematuhi kebijakan yang sudah ditetapkan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## A. Buku

- Adji Adisasmita, Sakti. *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Cahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yusdisia, 2016.
- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Angraini, Jum. *Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, Jakarta: Tama Jagakarsa, 2011.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Dellyana, Shanty. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Djam'in Satrio dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Hajar. M, *Model - Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, Pekanbaru: Suska Press, 2015.
- Hartono, *Metode Penelitian*. Pekanbaru: Anafah Publishing, 2011.
- Herdiansyah, Heris, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: PT. Salemba Humanika, 2010.
- Kansil, C.S.T, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2017.
- Masry Simbolon, Mariangan. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.

P. Warpani, Suwardjoko. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB, 2002.

Siagian, S.P. *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet, 2014.

Tisnawati Sule, Ernie. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2010.

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

#### B. Jurnal

Abdi Wibowo, dkk, *Pengembangan Desain Konstruksi Kendaraan Becak Bermotor*, Jurnal Teknik Mesin Sinergi, Vol. 6 No. 2, 2008.

Meta Suryani dan Anis Mashdurohatun, *Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Pembaharuan hukum, Vol. 3 No.1, 2016.

#### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas.



#### Hak Cipta Dindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Webb

<https://dishub.dumaikota.go.id/lambang-dinas-perhubungan/>. Diakses pada tanggal 18 Juni, jam 08:45 Wib.

<https://dishub.dumaikota.go.id/visi-dan-misi/>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2021, jam 16:55 Wib.

<https://id.wikipedia.org/wiki/KotaDumai/>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2021, jam 16:30 Wib.

<http://rikiseptiawan180991.blogspot.com/2012/12/hukum-pengangkutan-niaga>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2021, jam 13:30 Wib.



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *"PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP BECAK BERMOTOR YANG MELINTAS DI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KOTA DUMAI"* yang ditulis oleh :

Nama : **M. Sobri Darwis Ade Saputra**  
 NIM : 11720714936  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Telah dimunaqasahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Senin, 20 September 2021  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Oktober 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Asril, S.H.I., M.H.**

Sekretaris  
**Musrifah, S.H, M.H.**

Penguji I  
**Dr. ABU SAMAH, M.H**

Penguji II  
**Firdaus, SH., MH**

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jallmus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 27 Januari 2021

Nomor : Un.04/F.I.1/PP.00.9/1497/2021  
Sifat : Biasa  
Lamp. : -  
Hal : **Mohon Izin Melakukan PraRiset**

Kepada  
Yth.  
Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai  
di  
Tempat

Assalamu'alaikum warhmatullahi wabarakatuh

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : M. SOBRI DARWIS ADE SAPUTRA  
NIM : 11720714936  
Semester/Tahun : VII (Tujuh)/ 2021  
Program Studi : Ilmu Hukum S1

ditugaskan untuk melaksanakan prariset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin dengan judul : PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP BECAK BERMOTOR YANG MELINTAS DIKAWASAN TERTIB LALU LINTAS BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KOTA DUMAI.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP.19580712 198603 1 005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor  
Sifat  
Lamp  
Hal

Indikasi Undang-Undang

Un.04/F.I/PP.00.9/2400/2021

Pekanbaru, 24 Februari 2021

: Biasa  
: 1 (Satu) Proposal  
: **Mohon Izin Riset**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: M. SOBRI DARWIS ADE SAPUTRA
NIM	: 11720714936
Jurusan	: Ilmu Hukum SI
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Dinas Perhubungan Kota Dumai

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
: PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP BECAK BERMOTOR YANG  
MELINTAS DI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS BERDASARKAN PERATURAN  
WALIKOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU  
LINTAS KOTA DUMAI

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul : **PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP BECAK BERMOTOR YANG MELINTAS DI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KOTA DUMAI**, ditulis oleh saudara:

Nama : M.SOBRI DARWIS ADE SAPUTRA  
NIM : 11720714936  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Diseminarkan pada  
Hari / Tanggal : Senin, 22 Februari 2021  
Narasumber : Nur Hidayat, S.H., MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru, 27 Februari 2021  
Narasumber

Jalinus, S.Ag.  
19750801 200701 1 023

Nur Hidayat, S.H., MH  
NIP/NIK.130217038

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang

ciptanya milik UIN Suska Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39101  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat  
 Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :  
 Un.04/F.II/PP.00.9/2400/2021 Tanggal 24 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

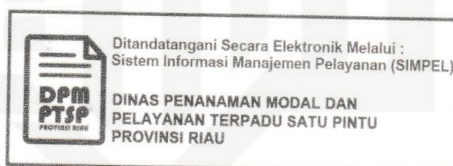
- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>M. SOBRI DARWIS ADE SAPUTRA</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11720714936   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP BECAK BERMOTOR YANG<br/>       MELINTAS DI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS BERDASARKAN PERATURAN<br/>       WALIKOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU<br/>       LINTAS KOTA DUMAI</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 26 Februari 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Dumai
3. Up. Kakan Kesbangpol dan Linmas di Dumai
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

JL. H.R. Soebrantas No. 135 Dumai Telp / Fax (0765) 31152  
DUMAI



Dumai, 26 Maret 2021

Nomor : 800/DISHUB - SEKRI / 176  
Lampiran : -  
Perihal : Pra Penelitian

Kepada :  
Yth. Dekan Falkutas Syariah dan  
Hukum UIN suska Riau,  
di-

Pekanbaru

Menindak lanjuti surat Saudara Nomor: Un.04/F.II/PP.09/2400  
/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal Pra Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami setuju  
dan tidak keberatan atas pelaksanaan Pra Penelitian pada Dinas  
Perhubungan Kota Dumai atas :

Nama : **M. SOBRI DARWIS ADE SAPUTRA**

NIM : 11720714936

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Proposal: PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN  
TERHADAP BECAK BERMOTOR YANG  
MELINTAS DI KAWASAN TERTIB LALU  
LINTAS BERDASARKAN PERATURAN  
WALIKOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN  
2017 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU  
LINTAS KOTA DUMAI.

Selanjutnya untuk kelancaran kegiatan Pra Penelitian  
dimaksud, diharapkan kepada mahasiswa tersebut mentaati  
ketentuan dan aturan yang berlaku pada Dinas Perhubungan Kota  
Dumai.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima  
kasih.



**ASNAR, SP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700406 200312 1 002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dinas Perhubungan Kota Dumai Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : M.SOBRI DARWIS ADE SAPUTRA  
**NIM** : 11720714936  
**JURUSAN** : ILMU HUKUM  
**JUDUL** : PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP BECAK BERMOTOR YANG MELINTAS DI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS KOTA DUMAI

**Pembimbing:** Basir SH.I, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 11 Oktober 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
**NIP. 19880430 201903 1 010**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**M. Sobri Darwis Ade Saputra**, dilahirkan di Dumai pada tanggal 10 Juni 1999. Anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan ayahanda Daruwis dan ibunda Elni Marusda, saat ini penulis tinggal di Jalan Cempedak Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 005 Teluk Binjai Dumai, lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Dumai, dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Dumai dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara. Pada Tahun 2019 penulis melakukan magang di Pengadilan Negeri Dumai Kelas I-A setelah itu melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Datuk Laksamana, Kecamatan Dumai Kota, Riau. Pada tanggal 20 September 2021 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi **“Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Becak Bermotor yang Melintas di Kawasan Tertib Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas Kota Dumai”**.